

# STABILITAS SEKTOR JASA KEUANGAN TERJAGA DI TENGAH MENINGKATNYA DINAMIKA GLOBAL

“Stabilitas Sektor Jasa Keuangan (SJK) tetap terjaga, di tengah tingginya dinamika perekonomian dan volatilitas pasar keuangan global”

## PERKEMBANGAN INDIKATOR PEREKONOMIAN

### Global



- Perkembangan pada bulan April 2025 didominasi oleh meningkatnya ketidakpastian kebijakan perdagangan global dengan rencana pengenaan tarif impor resiprokal oleh Amerika Serikat (AS).
- Tingginya ketidakpastian akibat dinamika perdagangan global telah mendorong lembaga internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO merevisi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global.
- IMF menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 menjadi 2,8 persen, jauh lebih rendah dibandingkan historis (2000-2019) di level 3,7 persen. Sementara itu, WTO merevisi proyeksi volume perdagangan barang global pada 2025 menjadi berkontraksi 0,2 persen yoy, dari prakiraan sebelumnya tumbuh 2,7 persen (2024: 2,9 persen).

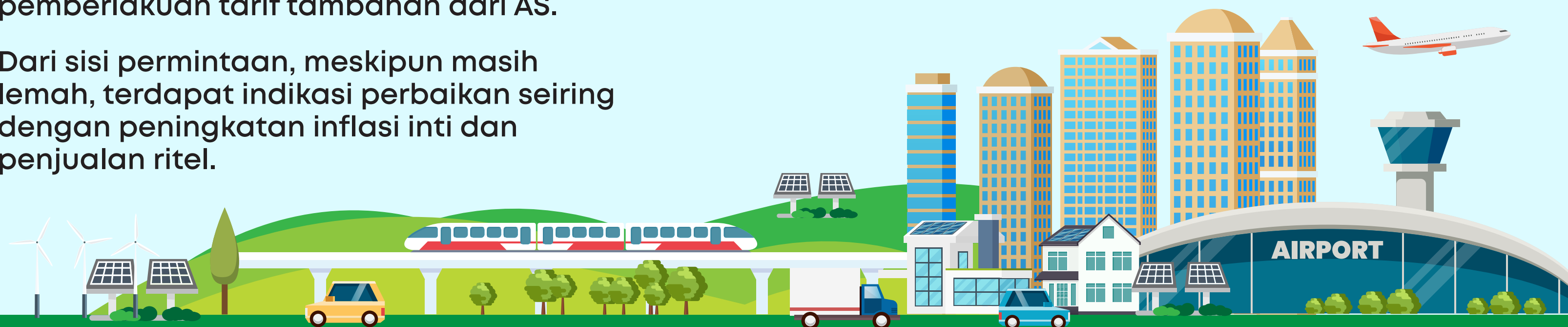


### Amerika Serikat

- Meskipun data ketenagakerjaan relatif solid, sejumlah indikator aktivitas ekonomi terbaru mengindikasikan perlambatan, seperti inflasi, tingkat kepercayaan konsumen, dan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2025.
  - Sejalan dengan hal tersebut, pertumbuhan ekonomi AS pada 2025 diproyeksikan menjadi 1,4 persen (sebelumnya 2 persen).
  - Pasar mulai memperkirakan penurunan suku bunga acuan (FFR) secara lebih agresif, dengan pemangkasan pertama diperkirakan terjadi pada Juni 2025.
- ### Tiongkok
- Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2025 tercatat solid, ditopang oleh kinerja sektor manufaktur. Pertumbuhan ini sebagian besar didorong oleh strategi *front-loading* ekspor guna mengantisipasi pemberlakuan tarif tambahan dari AS.
  - Dari sisi permintaan, meskipun masih lemah, terdapat indikasi perbaikan seiring dengan peningkatan inflasi inti dan penjualan ritel.

### Domestik

- Perekonomian mencatat pertumbuhan sebesar 4,87 persen pada triwulan I 2025, didukung oleh konsumsi rumah tangga yang tetap terjaga baik.
- Inflasi *headline* pada April 2025 tetap terkendali di level 1,95 persen yoy. Inflasi inti juga menunjukkan stabilitas di level 2,50 persen yoy, mencerminkan permintaan domestik yang cukup terjaga.
- Beberapa indikator permintaan domestik lainnya seperti penjualan ritel, semen, dan kendaraan bermotor mengindikasikan pemulihan yang masih berlangsung, meskipun dengan laju yang moderat.
- Dari sisi produksi, kinerja masih cukup baik terlihat dari berlanjutnya surplus neraca perdagangan dan kinerja emiten di mana rilis kinerja tahun 2024 secara umum lebih baik dari tahun 2023.



## PASAR MODAL, DERIVATIF KEUANGAN, DAN BURSA KARBON (PMDK)



**IHSG**  
**6.766,80**  
30 Apr'25 ~4,42% ytd



**Jumlah Investor**  
**16,25 Juta**  
30 Apr'25



**Nilai Kapitalisasi Pasar**  
Rp  
**11.705 T**  
30 Apr'25 5,20% mtd



**Nilai Penawaran Umum**  
Rp  
**56,06 T**  
30 Apr'25



**NAB Rekasa Dana**  
Rp  
**502,10 T**  
30 Apr'25 1,66% mtd

### Pasar Derivatif Keuangan

s.d. 30 April 2025

**56**  
Pelaku

**6**  
Penyelenggara

**Rp 1.050,58 T**  
Akumulasi Nilai

### Securities Crowdfunding

s.d. 30 April 2025

**18**  
penyelenggara berizin OJK

**Rp 1,53 triliun**  
total dana yang dihimpun

**805**  
penerbitan Efek

**179.363**  
pemodal



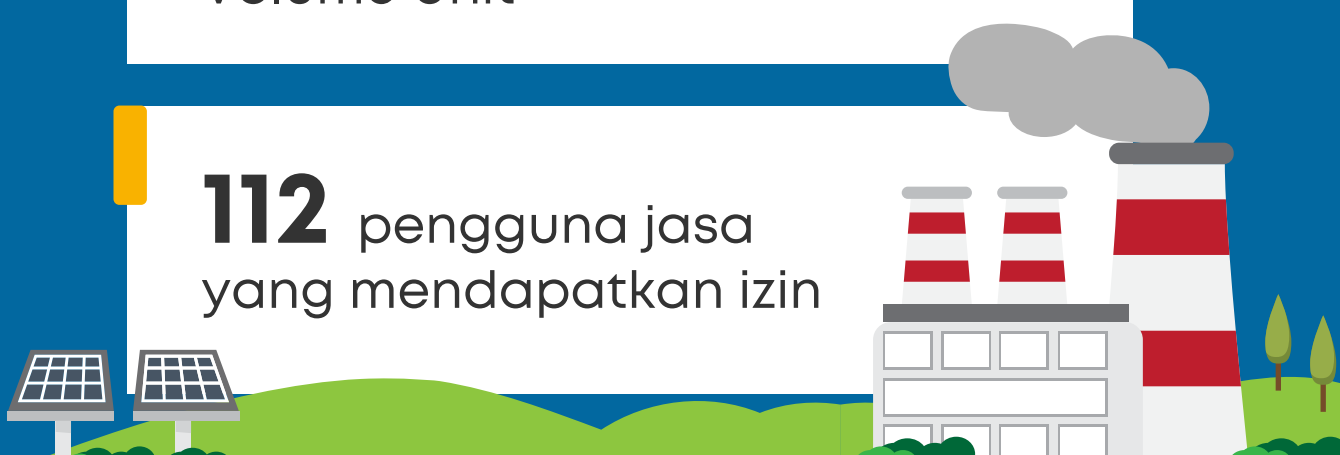
### Perdagangan Karbon

s.d. 30 April 2025

**Rp 77,92 miliar**  
Akumulasi Nilai Perdagangan

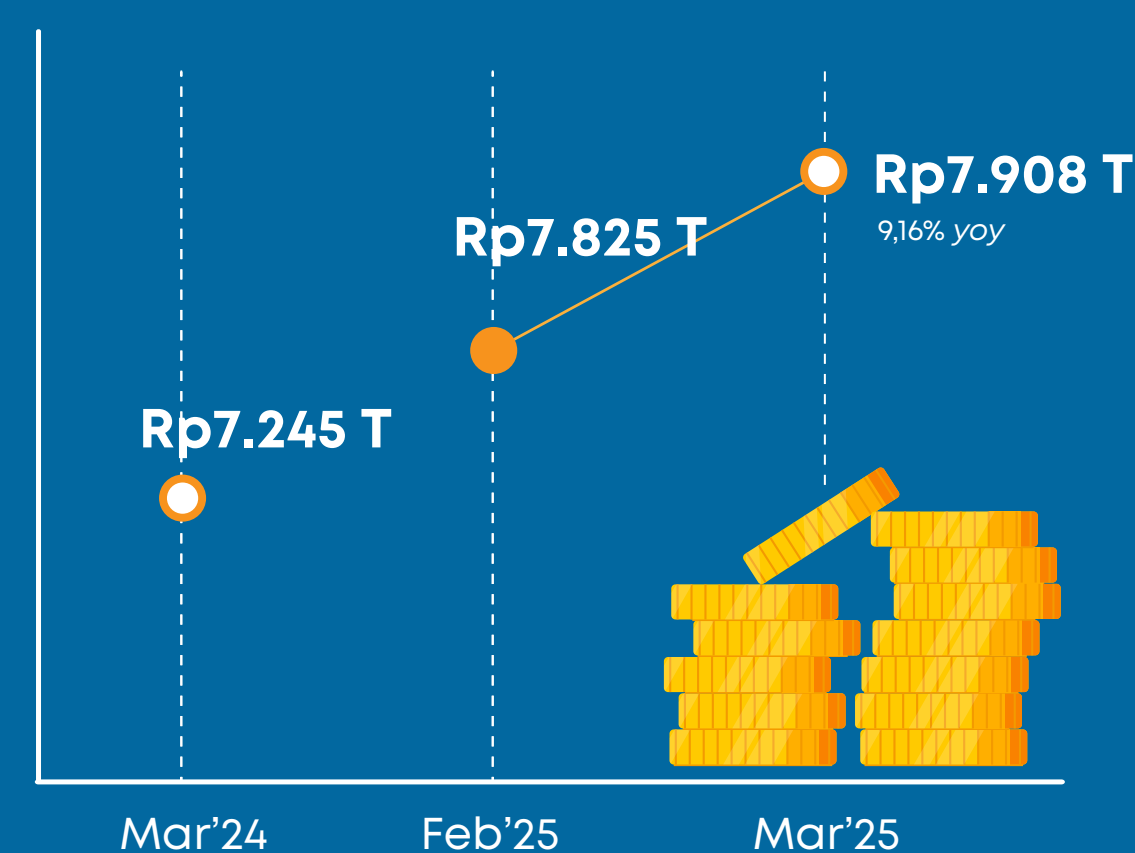
**1.598.750 tCO2e**  
Volume Unit

**112** pengguna jasa yang mendapatkan izin

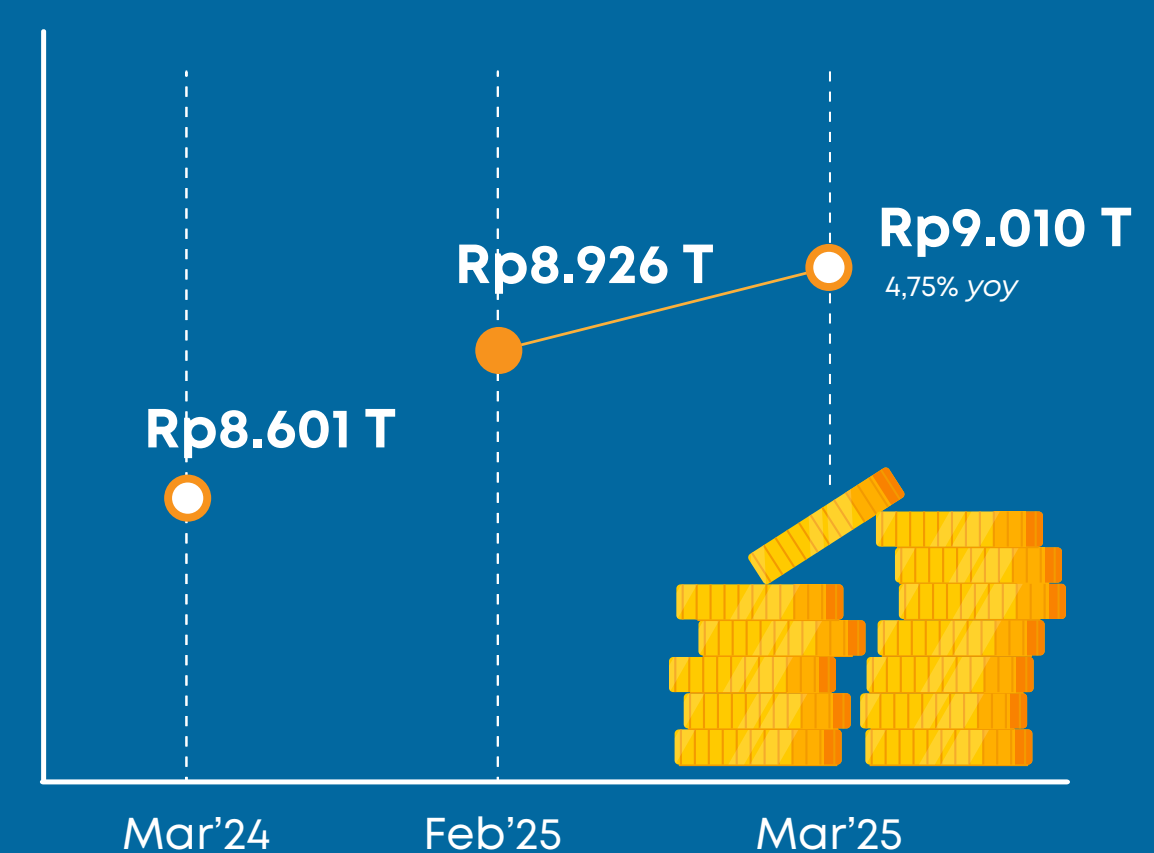


## PERBANKAN (PBKN)

### Kredit



### Dana Pihak Ketiga



### Kredit Investasi

**13,36%**  
yoy  
Mar'25

### Kredit Modal Kerja

**6,51%**  
yoy  
Mar'25

### Kredit Konsumsi

**9,32%**  
yoy  
Mar'25

Mar'25

**CAR**  
**25,43%**

**NPL Gross**  
**2,17%**

**ROA**  
**2,58%**

**AL/DPK**  
**26,22%**

**LaR**  
**9,86%**

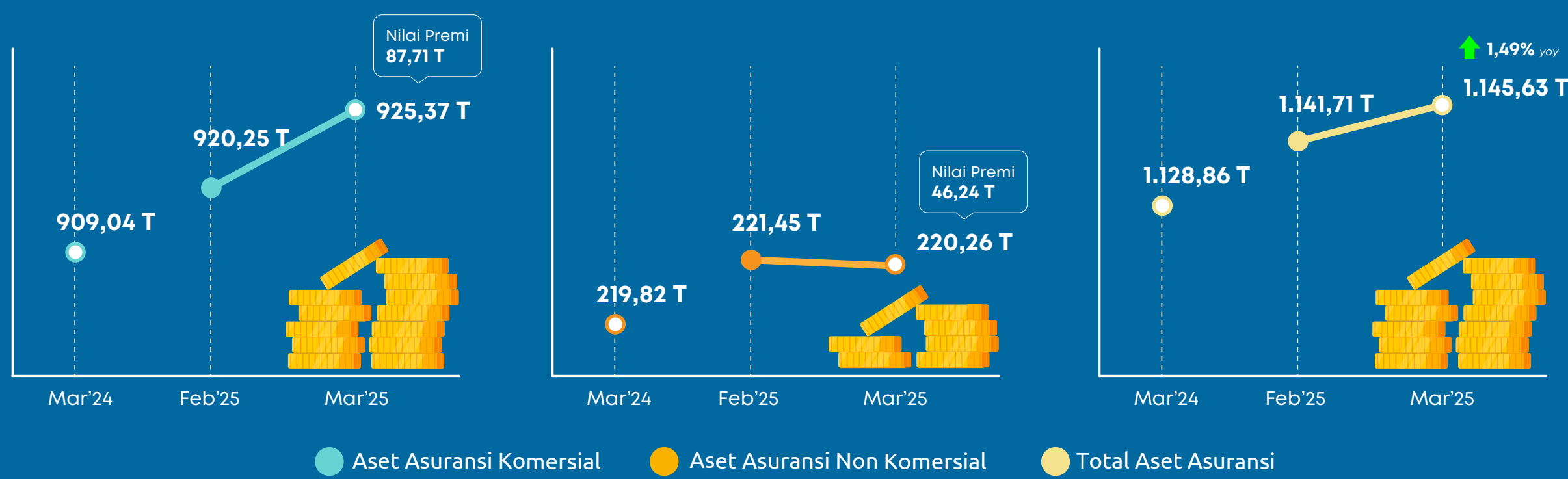
**AL/NCD**  
**116,05%**

**NIM**  
**4,51%**



# PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN (PPDP)

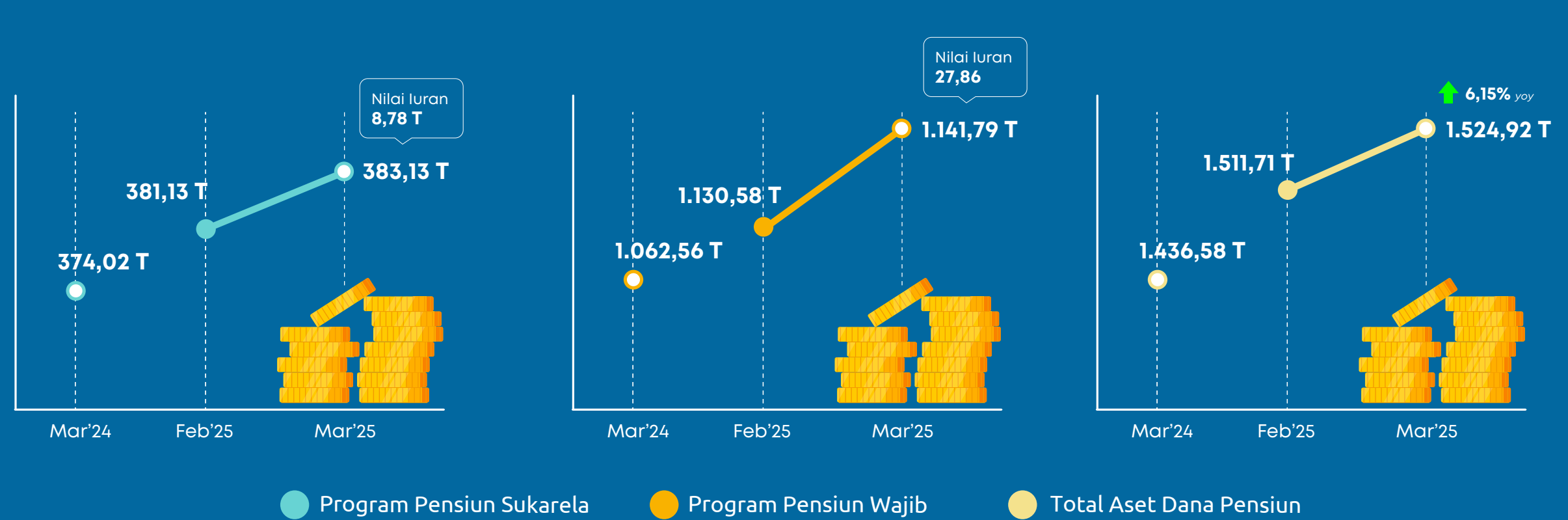
## Aset Asuransi (Rp)



**RBC Asuransi Jiwa** Mar'25  
**467,73%**

**RBC Asuransi Umum dan Reasuransi** Mar'25  
**316,96%**

## Aset Dana Pensiun (Rp)



## Aset Perusahaan Penjaminan



**Nilai Imbal Jasa Penjaminan** Mar'25  
**Rp2,09 T**

# LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA (PVML)

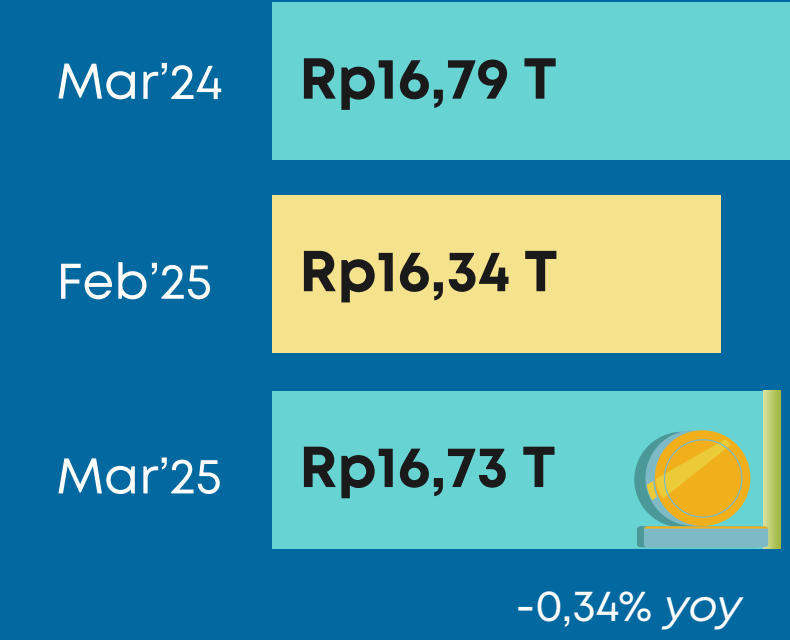
## Piutang Pembiayaan



## Outstanding Pembiayaan Fintech P2P Lending



## Pembiayaan Modal Ventura



**TWP 90 Fintech P2P Lending** Mar'25  
**2,77%**

**Gearing Ratio Perusahaan Pembiayaan** Mar'25  
**2,26x**

**NPF Perusahaan Pembiayaan (gross)** Mar'25  
**2,71%**

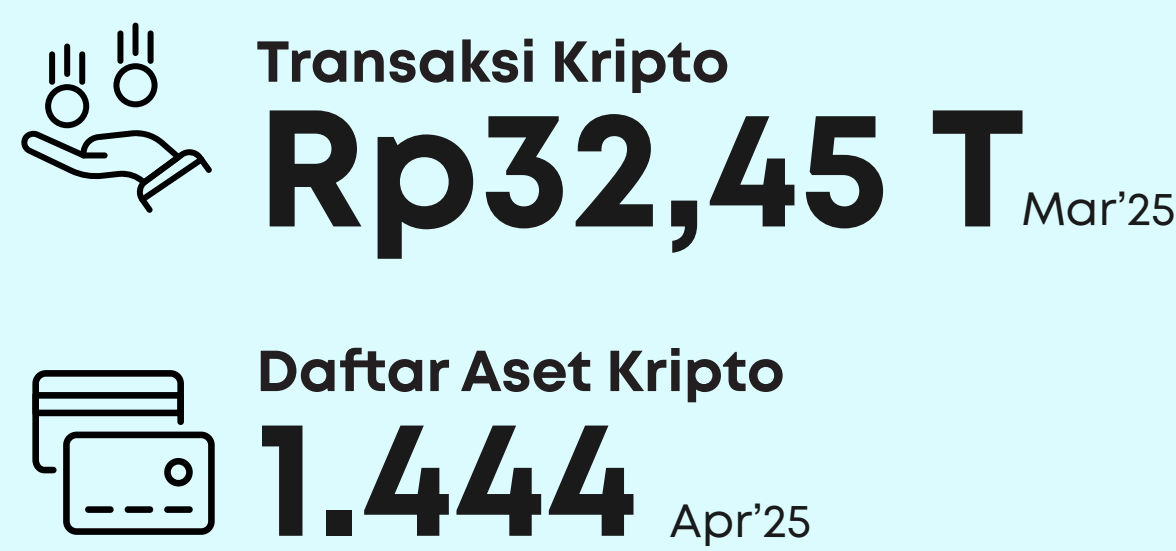


# INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN, ASET KEUANGAN DIGITAL, DAN ASET KRIPTO (IAKD)

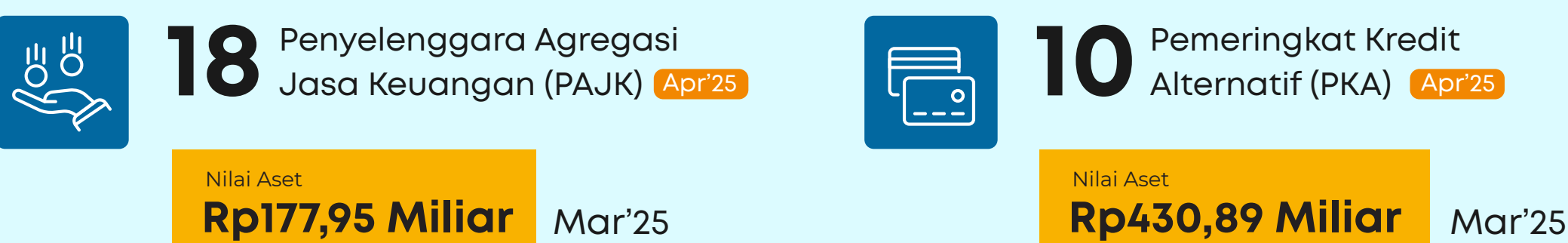
## Regulatory Sandbox



## Aset Kripto



## Penyelenggara ITSK

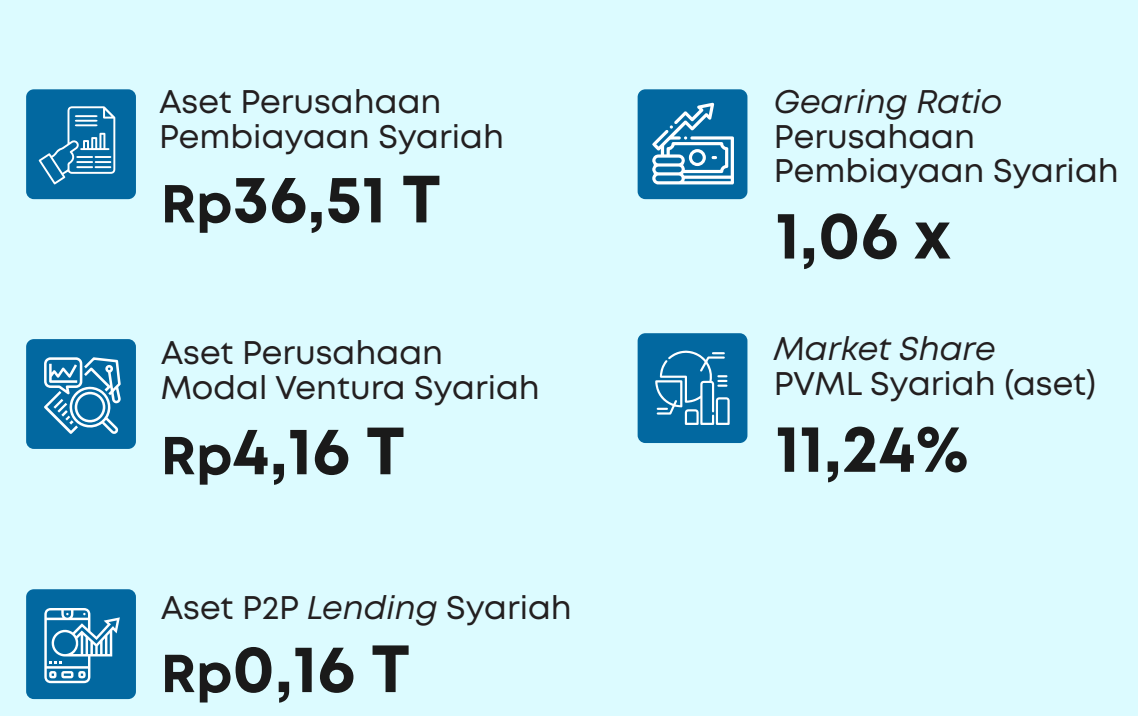


# SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

## Pasar Modal Syariah



## PVML Syariah



## Perbankan Syariah

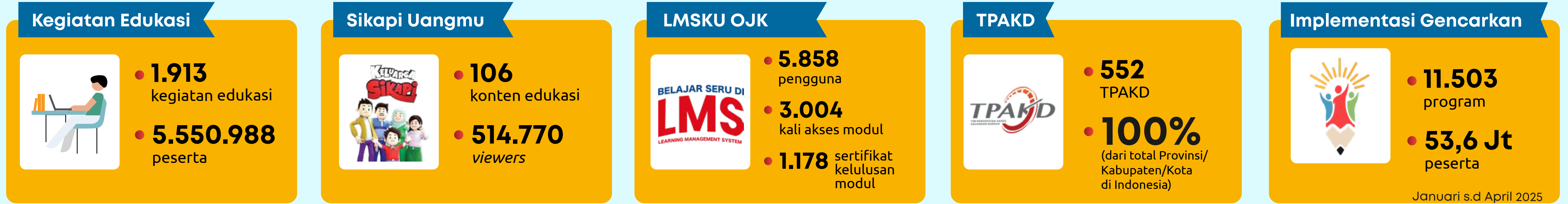


## PPDP Syariah

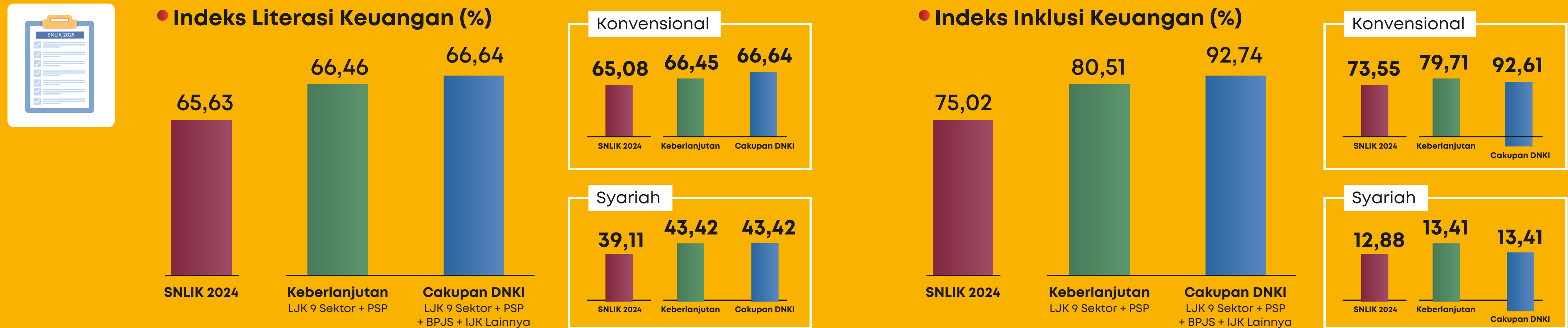


## PENGAWASAN PERILAKU PELAKU USAHA JASA KEUANGAN, EDUKASI, DAN PELINDUNGAN KONSUMEN (PEPK)

### Program Literasi dan Edukasi Keuangan



### Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2025 (SNLIK 2025)



Dalam rangka mensinergikan dan menerjemahkan strategi nasional (RPJPN & RPJMN) menjadi program kerja daerah yang dapat digunakan oleh TPAKD, telah dilakukan kolaborasi dan sinergi dalam menyusun Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) untuk memenuhi kebutuhan ketersediaan ukuran inklusi keuangan di tingkat daerah (provinsi dan kabupaten/kota).

### Program Pelindungan Konsumen dan Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal



## ARAH KEBIJAKAN OJK

Dalam rangka menjaga stabilitas Sektor Jasa Keuangan (SJK) dan meningkatkan peran SJK bagi pertumbuhan ekonomi nasional, OJK menempuh langkah-langkah kebijakan sebagai berikut:

### Kebijakan Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

Ketidakpastian yang meningkat akibat tarif dagang AS dan indikator ekonomi global yang cenderung bergerak melemah, mengakibatkan investor *risk off* dan terjadi fluktuasi di pasar keuangan. Oleh karena itu:

- OJK terus memonitor dinamika global dan domestik serta melakukan *stress test* untuk melihat dampaknya terhadap SJK. Saat ini SJK Indonesia dinilai tetap resilien dengan permodalan yang solid dan mampu menyerap potensi peningkatan risiko ke depan.
- Menerbitkan kebijakan *buyback* saham tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pada periode 20 Maret s.d. 30 April 2025, terdapat 32 Emiten yang berencana untuk melakukan *buyback* tanpa RUPS, dengan perkiraan alokasi dana *buyback* sebesar Rp16,90 triliun. Dari 32 Emiten tersebut terdapat 24 Emiten yang telah melakukan pelaksanaan *buyback* dengan nilai realisasi sebesar Rp937,42 miliar atau sebesar 5,55 persen.
- Melakukan penundaan implementasi pembiayaan transaksi *short selling*, penyesuaian batasan *trading halt* pada saat penurunan IHSG yang signifikan, serta pemberlakuan *asymmetric auto rejection* saham.

## Kebijakan Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (SJK) serta Infrastruktur Pasar



- A. Mendukung upaya pengembangan ekonomi daerah untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional, antara lain melalui pengembangan sektor agrikultur, pariwisata dan ekonomi kreatif dengan mendorong pembiayaan atau penyaluran kredit pada sektor-sektor dimaksud, serta melibatkan asuransi untuk memitigasi risiko dan menyiapkan ekosistem yang memadai. Penguatan peran SJK dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dilakukan melalui Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) dalam wadah Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang melibatkan para pemangku kepentingan, sebagaimana ditekankan dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah.
- B. Menetapkan beberapa ketentuan, sebagai berikut:
1. POJK Nomor 7 Tahun 2025 tentang Laporan Bank Umum Sebagai Kustodian, yang merupakan bentuk integrasi pengaturan kewajiban penyampaian laporan Bank Kustodian yang selama ini terdapat irisan antar sektor.
  2. POJK Nomor 6 Tahun 2025 tentang Laporan Agen Penjual Efek Reksa Dana.
  3. POJK Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan atas POJK Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.
  4. POJK Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin.
  5. SEOJK Nomor 3 tentang Perubahan atas SEOJK Nomor 25/SEOJK.04/2021 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Perusahaan Efek.
  6. SEOJK Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaporan Penyelenggara ITSK yang memiliki Izin Usaha di OJK.
  7. Panduan Tata Kelola *Artificial Intelligence* (AI) di Sektor Perbankan, yang menjabarkan prinsip-prinsip penggunaan AI di perbankan nasional, antara lain terkait akuntabilitas, pengawasan manusia, dan keandalan.
- C. Dalam tahap penyusunan beberapa ketentuan, sebagai berikut:
1. RPOJK tentang Akses Pembiayaan kepada UMKM sebagaimana diamanatkan UU P2SK.
  2. RPOJK tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
  3. RPOJK tentang Pelaporan Bank Umum melalui Sistem Pelaporan OJK, yang disusun untuk mendukung proses penyederhanaan dan digitalisasi pelaporan.
  4. RPOJK tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan di bidang Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun.
  5. RPOJK tentang Kantor Perwakilan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang Berkedudukan di Luar Negeri.
  6. RSEOJK tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pihak Utama Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan Nonoperasional.
  7. RSEOJK tentang Laporan Berkala Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilaian Kerugian Asuransi
  8. RSEOJK tentang Informasi dan Pemasaran Produk dan Layanan Jasa Keuangan.
  9. RSEOJK tentang Penyusunan dan Penyampaian Laporan Layanan Pengaduan oleh PUJK kepada OJK termasuk bagi PUJK baru, di antaranya perusahaan perdagangan aset kripto.



## Pengembangan dan Penguatan SJK Syariah



- A. Sebagai tindak lanjut atas Pasal 9 POJK Nomor 11 Tahun 2023, 41 perusahaan telah menyampaikan perubahan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah (RKPUS), di mana 29 perusahaan menyatakan akan melakukan *spin-off* unit syariah dengan mendirikan perusahaan baru dan 12 perusahaan akan mengalihkan portofolio kepada perusahaan lain. Pada tahun 2025 direncanakan 26 perusahaan akan melakukan *spin off* unit syariah, terdiri dari 18 perusahaan mendirikan perusahaan baru dan 8 perusahaan mengalihkan portofolio kepada perusahaan lain.
- B. Penguatan kolaborasi dan aliansi strategis pengembangan keuangan syariah, termasuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah antara lain:
1. Pembentukan Duta Literasi Keuangan Syariah melalui kegiatan Sahabat Ibu Cakap Literasi Keuangan Syariah (SICANTIKS). Dalam rangka Hari Kartini, kegiatan SICANTIKS diselenggarakan pada tanggal 28 April 2025 di Jakarta dengan mengangkat tema “Kartini di Era Digital: Perencana Keuangan Perempuan sebagai Penggerak Literasi Keuangan Syariah”, dihadiri oleh 100 perencana keuangan perempuan anggota *Financial Planning Standards Board* (FPSB) dan *International Association of Registered Financial Consultants* (IARFC).
  2. Bekerja sama dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang melaksanakan kegiatan *Training of Trainers* (ToT) Industri Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) Syariah dan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara UIN Raden Fatah Palembang dan salah satu Perusahaan asuransi terkait kerja sama pengembangan asuransi syariah dan manajemen zakat dan wakaf antara kedua lembaga.

## Penguatan Tata Kelola OJK



- A. Berkomitmen untuk senantiasa menerapkan *best practices* dalam rangka implementasi standar tertinggi dalam penguatan integritas agar dapat menjadi *role model* bagi SJK.
- B. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan seluruh *stakeholders*, antara lain kementerian/lembaga, asosiasi profesi, dan akademisi di bidang *Governance, Risk, and Compliance* (GRC) dalam memperkuat governansi dan penegakan integritas SJK
- C. Melakukan penginian pengelolaan profil risiko organisasi OJK untuk tahun 2025.
- D. Berkomitmen dalam mendorong kesetaraan gender, penguatan integritas, dan pemberdayaan perempuan di SJK, salah satunya melalui penyelenggaraan perayaan Hari Kartini dengan tema “Perempuan Cerdas, Berdaya, dan Berintegritas Menuju Indonesia Emas”.
- E. Berkomitmen untuk senantiasa menerapkan *best practices* dalam memperkuat implementasi *Governance, Risk, and Compliance* (GRC) guna mendukung pencapaian *destination statement* OJK.

## Penegakan Ketentuan Di SJK Dan Perkembangan Penyidikan Perkembangan fungsi Penyidikan



141 Perkara selesai

118 Perkara

5 Perkara PMDK

20 Perkara PPDP

1 Perkara PVML

127 Putusan Pengadilan

115 Inkraht

1 Banding

11 Kasasi

- C. Penyidik OJK telah menuntaskan penanganan 1 perkara tindak pidana perbankan dengan melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti dan melakukan pelimpahan kepada Kejaksaan Negeri setempat.
- D. Penyidik OJK juga melakukan penyerahan tersangka yang merupakan debitur perbankan. Tindak pidana perbankan oleh Debitur ini merupakan perluasan subyek hukum di UU P2SK, dimana sebelumnya hanya dikenakan terbatas pada Pemegang Saham, Komisaris serta Pegawai Bank.